

Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon Perspektif Model Pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun

Adhitya Setiawan Arya Marsudi¹⁾, Jaharuddin²⁾

^{1,2} Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email korespondensi: adhitya.autodesk@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze poverty alleviation in the city of Cilegon with the perspective of As-Syatibi and Ibn Khaldun's development model, using literature research, with a descriptive qualitative approach. Result: (1). The as-Syatibi Development Model based on Maqashid Syariah is a refinement of programs that have been implemented, the form of real programs based on Maqashid Syariah can be in the form of (a). Grow and develop moral character. (b). Meets minimum requirements. (c). Cultivate the character of achievement and competence. (d). Cultivate and develop the responsibility of building a family. (f). Regulations favor groups that must be assisted. (2). From the empirical data analysis, it is found that the poverty alleviation program is implemented through (a). Increase GDP. (b). Increase spending on education and health. (c). Equitable development. (d). Increase investment. (e). Increase Expenditure for human resource development. (3). Ibn Khaldun's Development Model encourages poverty alleviation by reviving tauhid, fully adopting the concept of Islamic economics, and bringing justice to society. This research has the novelty of analyzing with the Islamic development model approach of As-Syatibi and Ibn Khaldun

Kata Kunci: *Pengentasan Kemiskinan, Model Pembangunan Islam, As-Syatibi, Ibn Khaldun*

Saran sitasi: Marsudi, A. S., & Jaharuddin. (2022). Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon Perspektif Model Pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 384-396. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4096>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4096>

1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tugas mengentaskan kemiskinan. Salah satu masalah di Indonesia saat ini adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sudah dilakukan namun perlu peningkatan. Salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya mengalami kenaikan lalu sempat turun sedikit lalu sekarang makin meningkat yaitu di Kota Cilegon. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon (n.d) merilis jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 berjumlah 13.964 jiwa, tahun 2019 turun menjadi 13.200 jiwa, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat banyak yaitu berjumlah 16.310.

Ekonomi konvensional mempunyai cara-cara menghadapi tingkat kemiskinan. Selain ekonomi konvensional ada juga ekonomi Islam yang menggunakan landasan hukum Al-Qur'an dan Hadist.

Didalam ekonomi Islam ada beberapa cara untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Ekonomi Islam juga mengajarkan bagaimana pemerintah mengatur dan membantu rakyatnya agar tidak mengalami kemiskinan. Adanya kemiskinan di suatu daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari tingkat pendidikan, malas bekerja, lapangan kerja yang terbatas, biaya hidup yang tinggi, sistem pemerintahannya, dan lain sebagainya.

Perbandingan Definisi Kemiskinan Konvensional dan Islam

Unsur Dalam Definisi Kemiskinan	Konvensional	Islam	Analisis
Ketuhanan	-	<i>habl min Allah</i>	Konvensional meniadakan unsur ketuhanan
Kemanusiaan	-	<i>habl min la-Nas</i>	Hubungan sesama manusia

Unsur Dalam Definisi Kemiskinan	Koven sional	Islam	Analisis
			dalam konvensional dikesampingkan
Pendekatan	Unsur ekstrim dan zuhuf	Pertengahan	Islam menggunakan pendekatan di pertengahan di antara yang terlalu ekstrim dengan zuhuf yang di salah artikan
Kesyumulan	Terikat dengan multidisiplin	Syumul	Definisi yang diutarakan oleh konvensional sering berubah-ubah karena terikat dengan multidisiplin yang berbagai berbandingan Islam yang lebih syumul sewaktu mengemukakan definisi.
Keperluan Manusia	Jasmani saja	Jasmani dan rohani	Manusia terdiri dari dua unsur yaitu rohani dan jasmani. Oleh karena itu, kedua-dua unsur ini perlu dipenuhi keperluannya sebagai Islam.

Sumber : Radieah Mohd Nor (2013)

Berawal dari tingkat kemiskinan di Kota Cilegon pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, penulis melakukan analisis beberapa solusi permasalahan kemiskinan yang berada di Kota Cilegon dengan perspektif Ekonomi Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist. Penulis mempunyai keyakinan bahwa Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman bagi umat muslim didunia (*rahmatan lil alamin*). Penulis melakukan penelitian ini agar bisa menemukan beberapa solusi dari kemiskinan yang ada di Kota Cilegon dengan perspektif ekonom syariah yaitu model pembangunan

As-Syatibi dan Ibnu Khaldun.

2. LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Menurut Badan Pengelola Statistik (n.d) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut Jonathan Haughton dan Shahidur R (2012) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan (Isdjoyo, 2010), yaitu:

- a. Ketidakberdayaan
Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan.
- b. Keterkucilan
Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan

akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.

c. Kemiskinan materi

Kondisi ini disebabkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.

d. Kerentanan

Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam.

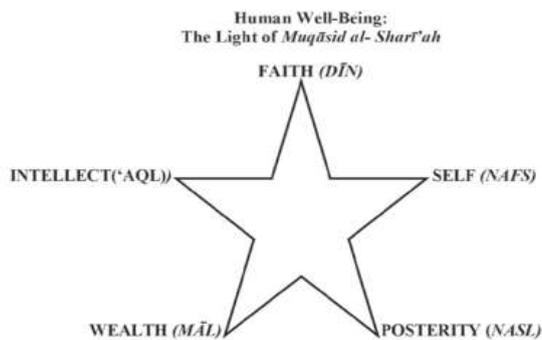
e. Sikap

Sikap yang menerima apa adanya kondisi yang ada dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Model Pembangunan As-Syatibi Peranan Maqashid Shariah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Model pembangunan As Syatibi adalah model pembangunan yang didasarkan pada tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana dalam hal ini tujuan tersebut adalah untuk mencapai maqashid syariah. Dua Ilmuwan yang teridentifikasi dalam menyokong model dengan pendekatan ini adalah Al-Ghazali dan Umer Chapra. Dalam model ini yang menjadi pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia (human beings) dengan fokus untuk melindungi lima aspek maqashid syariah, yaitu menjaga (1). Agama. (2). Jiwa. (3). Akal. (4). Keturunan dan (5). Harta.

Umer Chapra membuat gambar satu kesatuan dimensi Maqashid Syariah berikut ini:



Sumber : Chapra, 2008

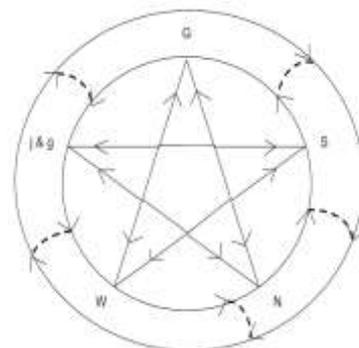
A. Jajang W. Mahri, Cupian, dkk (2021) menjelaskan pada dasarnya model pembangunan ini disadur berdasarkan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dalam model ini ekonomi pembangunan diturunkan dari komponen tujuan pembangunan. Maqashid Syariah sebagai landasan dasar dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan hidup tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dapat diwujudkan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup manusia

sehingga akan memberikan dampak kemashalatan. Maslahat di sini merupakan kondisi dimana aspek material dan non-material sudah terpenuhi dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan maqashid syariah mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Konsep ini juga menitikberatkan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, bermanfaat secara sosial serta tidak menyalahgunakan pemanfaatan kekayaan alam. Kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf).

Allah tidak memandang baik kepada mereka yang menghabiskan dan menggunakan sumber daya secara boros, kekayaan yang ditimbun, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap orang miskin. Semua manusia diciptakan sama, dalam prosesnya ada yang dikaruniai lebih banyak potensi, energi, dan kekayaan sehingga pasti terdapat perbedaan dalam tingkat keberhasilan ekonominya. Dengan demikian, penting distribusi kekayaan dari pendapatan yang diperoleh untuk disalurkan kepada yang membutuhkan guna mencapai tujuan dari *maqashid syariah* yang hakiki.

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu *Daruriyyat* merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia, *Hajjiyat* merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya, dan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan penyempurna, tetapi tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap (A. Jajang W. Mahri, Cupian, dkk, 2021).

Model Pembangunan Ibnu Khaldun Dalam Pengentasan Kemiskinan



Sumber: Chapra (2001)

Akhmad Affandi dan Dewi Puji Astuti (2013) menjelaskan dalam rotasi siklus independen, masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh orang lain juga. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada penentuan variabel dependen dan independen, tetapi dapat bergiliran menjadi dependen variabel. Siklus tersebut terjadi dalam reaksi berantai dalam jangka waktu yang lama seperti terlihat pada gambar di atas. Konsep ceteris paribus tidak berlaku untuk analisis jangka panjang karena tidak ada variabel konstan. Satu variabel bertindak sebagai mekanisme pemicu dan yang lainnya dapat bereaksi secara arah yang sama. Jika faktor-faktor lain tidak bereaksi ke arah yang sama, semua dalam satu sektor tidak akan beralih ke variabel lain, sehingga akan mengarah pada kemungkinan diperbaikinya sektor yang rusak dan penurunan peradaban akan terjadi secara perlahan. Namun, jika lainnya sektor berjalan ke arah yang sama, Anda akan mendapatkan momentum yang tidak mungkin diidentifikasi karena hasil dari suatu fenomena. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun penyebab ini dan akibat disebut sebagai siklus atau lingkaran keadilan.

Model Ibnu Khaldun menekankan dalam struktur institusi ekonomi pembangunan Islam, bahwa proses pembangunan perlu didukung berbagai pihak, baik organisasi maupun instansi dalam sebuah entitas ekonomi. Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut (A. Jajang W. Mahri, Cupian, dkk, 2021):

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

G : Negara (*The State*)

S : Institusi/Syariah (*Institutions/Sharia*)

N : Sumber daya insani (*Human Beings*)

W : Kekayaan (*Wealth*)

j : Keadilan (*Justice*)

g : Pembangunan (*Development*)

Model matematis ini hanyalah salah satu model matematis yang dapat dibentuk dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun. Model ini sangat dinamis sebagaimana tergambar dalam gambar diatas dan kalimat *hikammiah*. Secara detail bagaimana pengaruh suatu faktor dan hubungannya dengan faktor-faktor lain akan dijelaskan sebagai berikut (A. Jajang W. Mahri, Cupian, dkk, 2021):

a. Negara (*The State*)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia

harus toleran, moderat, dan adil, serta harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan kepalsuan. Ia juga dituntut harus memenuhi semua kewajibannya, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka terutama terhadap golongan miskin, serta menghapuskan ketidakadilan dan penindasan.

b. Institusi/Syariah (*Institutions/Sharia*)

Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya, dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal maupun informal, tertulis atau tidak tertulis.

c. Sumber daya insani (*Human Beings*)

Dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitikberatkan pada peran manusia. Manusia memiliki peranan penting dalam dinamika peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kesejahteraan ditujukan bagi manusia. Ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Sedangkan sebagai alat pembangunan, manusia merupakan subjeknya yang bekerja untuk membangun. Manusia adalah input, manusia membentuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

d. Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan "Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan

menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.

e. Keadilan (*Justice*)

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan melalui persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang lain, pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosio ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apapun.

f. Pembangunan (*Development*)

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mukhtar (2013) menjelaskan Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Sugiyono (2012) menjelaskan Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Penelitian ini diadaptasi dari penelitian berjudul *Dynamic Model Of Ibn Khaldun Theory On Poverty (Empirical analysis on the poverty in majority and minority Muslim population after the financial crisis)* yang ditulis oleh Akhmad Affandi dan Dewi Puji Astuti pada tahun 2016. Menurut Ibnu Khaldun, kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh dimensi ekonomi. Kemiskinan dihadirkan faktor

fundamental seperti $P = f(W, G, N, S, g \text{ dan } j)$ dimana *Poverty* (P) adalah fungsi *Wealth of the Nation* (W), *Government* (G), *Human Resources/People* (N), *Syaria* (S), *Development* (g) dan *Justice* (j). Penelitian ini akan melakukan analisis deskripsi dari data tahun 2015-2020 di Kota Cilegon. *Wealth of the Nation* (W) akan diwakili oleh angka total investasi, *Government* (G) diwakili oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Human Resources/People* (N) diwakili oleh angka gini ratio, *Syaria* (S) diwakili oleh angka pendidikan dan kesehatan, *Development* (g) diwakili oleh angka Indeks Pembangunan Manusia, *Justice* (j) diwakili oleh angka Indeks Persepsi Korupsi.

4. PEMBAHASAN

Kota Cilegon

Cilegon pada Masa Pembentukan Districh Cilegon (Kewedanaan Cilegon) Sejak dibentuknya Districh Cilegon Tahun 1816, perkembangan Cilegon sangat pesat sehingga yang semula merupakan kampung kecil menjadi Kewedanaan. Kantor Districh Cilegon (Kewedanaan Cilegon) masih ada dan berdiri dengan kokoh sampai sekarang. Cilegon pada Masa Pemberontakan Geger Cilegon Pada Tanggal 9 Juli 1888 terjadi puncak perlawanan rakyat Cilegon kepada kolonial Belanda yang dipimpin oleh KH. Wasid yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon. Pemberontakan Geger Cilegon mengilhami perjuangan rakyat untuk membebaskan dari penindasan penjajah Belanda dan melepaskan diri dari kelaparan akibat tanam paksa pada masa itu. Cilegon pada Masa Tahun 1924, di Kewedanaan Cilegon telah ada perguruan pendidikan yang berbasis Islam yang menonjol yaitu Perguruan Al-Khaeriyah dan Madrasah Al-Jauharotunnakiyah Cibeber. Perguruan Al-Khaeriyah dan Al-Jauharotunnakiyah Cibeber berkembang dengan pesat dan melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang berbasis Islam di Cilegon. Sampai dengan saat ini Perguruan Al Khaeriyah dan Madrasah Al-Jauharotunnakiyah Cibeber masih eksis yang berlokasi di Desa Citangkil dan Desa Cibeber. Cilegon pada Masa Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 seperti rakyat Indonesia lain, rakyat Cilegon pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia telah menunjukkan semangat juangnya. Hal ini tak terlepas diilhami semangat juang KH. Wasid pada masa pemberontakan Geger Cilegon. Jiwa patriotisme rakyat Cilegon dan Banten pada umumnya di zaman revolusi fisik mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945 telah ditunjukkan terkenal dengan Tentara Banten (cilegon.go.id).

Cilegon Memasuki Era Tahun 1962 dengan hadirnya Pabrik Baja TRIKORA, merupakan babak baru bagi era industri di wilayah Cilegon. Perkembangan yang cepat industri baja TRIKORA tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 pada tanggal 31 Agustus 1970 berubah menjadi Pabrik Baja PT Krakatau Steel Cilegon berikut anak perusahaannya. Perkembangan industri yang pesat di Cilegon berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencarian penduduk Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi karyawan, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Kota Cilegon yang merupakan kota sedang yang memiliki potensi kota besar dengan segala fasilitas sarana dan prasarana perhubungan laut antara lain adanya pelabuhan penyeberangan (Ferry), Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus. Perubahan Kewedanaan Cilegon menjadi Kota Administratif Cilegon Tahun 1987 Kewedanaan Cilegon wilayahnya meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulomerak. Dengan perkembangan pembangunan yang sangat cepat terutama dengan adanya sentra industri baja PT Krakatau Steel beserta seluruh anak perusahaannya diikuti hadirnya pabrik-pabrik seperti PLTU Suralaya, PT Chandra Asri dan lain-lain telah mempengaruhi kondisi budaya dan penggunaan lahan dari daerah persawahan dan peladangan menjadi daerah industri, perdagangan, jasa dan perumahan serta pariwisata. Di Kota Cilegon saat ini terdapat industri berat dan menengah dalam kapasitas regional dan nasional. Kota Cilegon juga merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan pelabuhan penyeberangan Merak (cilegon.go.id).

Kesemuanya ini menjadikan Kota Cilegon fungsinya semakin berkembang, disamping sebagai kota industri juga sebagai kota transit, perdagangan dan jasa. Melihat kedudukan Kota Cilegon sangat strategis ditinjau dari segi politik, sosial budaya serta pertahanan keamanan, maka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kota Administratif Cilegon dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 (Lembaran Negara 3828) tanggal 20 April 1999

yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 27 April 1999 dan dirangkaikan dengan pengangkatan pejabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Cilegon yakni H. Tb. Riva'i Halir. Menjadi Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), maka penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon berubah menjadi Kota Cilegon (cilegon.go.id).

Kemiskinan Kota Cilegon

Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan	Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di Kota Cilegon		
	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,59	0,34	0,39
Indeks Kearifan Kemiskinan	0,18	0,07	0,06

Sumber : cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan diatas pada Indeks Kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 senilai 0,59 , pada tahun 2019 turun menjadi 0,34, dan pada tahun 2020 naik menjadi 0.39. Lalu pada Indeks Kearifan Kemiskinan pada pada tahun 2018 senilai 0,18, pada tahun 2019 turun menjadi 0,07, dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,06.

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	13.964	13.200	16.310
Persentase Penduduk Miskin	3,25%	3,03%	3,69%

Sumber : cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel Jumlah Penduduk Miskin diatas pada Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2018 berjumlah sebesar 13.964 dengan persentase 3,25%, tahun 2019 turun menjadi 13.200 dengan persentase 3,03%, dan tahun 2020 naik menjadi 16.310 dengan persentase 3,69%.

Garis Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)		
	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	428.867	459.469	504.571

Sumber : cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel Garis Kemiskinan diatas menunjukkan pada setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 bernilai 428.867, pada tahun 2019 bernilai 459.469, dan pada tahun 2020 bernilai 504.571.

Agama Masyarakat Di Kota Cilegon	
Islam	435.275
Kristen	6.979
Katholik	1.797
Hindu	228
Budha	1.675
Konghucu	7

Sumber: gis.dukcapil.kemendagri.go.id

Dari tabel diatas agama masyarakat di Kota Cilegon paling banyak menganut agama Islam yaitu sebesar 435.275, kemudian agama Kristen sebanyak 6.979, Katholik sebanyak 1.797, Hindu sebanyak 228, Budha sebanyak 1.675, dan konghucu sebanyak 7.

Kepala Dinas sosial Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan naiknya angka warga miskin di Cilegon karena sejumlah faktor. Salah satu yang paling utama adalah faktor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan warga menganggur. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihaknya telah menyiapkan jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial. Sedikitnya 4.300 KK diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ahmad Jubaedi berharap dengan hadirnya jaring pengaman sosial ini, warga terdampak Covid-19 mampu menjalani kehidupan pada masa kritis. (poskota.co.id, 2021).

Program Pengentasan Kemiskinan Kota Cilegon

Pada tahun 2018 Gubernur Banten salurkan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU) berupa kartu Multiguna untuk keperluan sekolah anak, membeli buku dan seragam. Tujuan bantuan ini adalah untuk membantu keluarga miskin di Banten. Dana Bansos JAMSOSRATU sebesar Rp1.665.000, dibagi ke dalam dua tahap pencairan, membantu agar anak-anak bisa sekolah dan keluarganya bisa sehat (Antaraneews Banten, 2018). Pada April 2020, Pemkot Cilegon menggelontorkan dana Rp74 miliar untuk penanganan penyebaran covid-19. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Cilegon Rp 29 miliar dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 45 Miliar. Belum lagi ditambah bantuan-bantuan dari pihak industri (Kompasiana.com). Pemkot Cilegon memiliki program pelayanan masyarakat bernama Kartu Cilegon Sejahtera (KCS). Saat ini, program tersebut

mulai masuk dalam tahap pendataan, dimana warga yang telah memiliki kartu KCS akan didata oleh petugas. KCS adalah program pelayanan masyarakat Kota Cilegon yang memiliki banyak manfaat. Terdapat empat manfaat untuk masyarakat pada program KCS, yakni bantuan modal UMKM, bantuan kesehatan, beasiswa sarjana, serta lapangan kerja (Sigit Angki Nugraha, 2021). Pemerintah Kota Cilegon memberikan beasiswa pendidikan full sarjana untuk masyarakat Kota Cilegon. Hal ini dilakukan sebagai realisasi program Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam Kartu Cilegon Sejahtera (KCS). Program ini diberikan langsung kepada penerima beasiswa dalam kegiatan launching program KCS Beasiswa Perguruan Tinggi di Aula Dinas Kominfo kota Cilegon, Senin (30/8). Lebih lanjut, Helldy menjelaskan bahwa tahun ini akan menganggarkan beasiswa full sarjana untuk 520 Mahasiswa. Diketahui, pemberian beasiswa ini tersebar ke delapan kecamatan di Kota Cilegon, diantaranya Kecamatan Cibeber 74, Kecamatan Cilegon 75, Kecamatan Citangkil 103, Kecamatan Ciwandan 73, Kecamatan Grogol 36, Kecamatan Jombang 59, Kecamatan Purwakarta 66 dan Kecamatan Pulomerak 34 beasiswa (Banpos.co, 2021).

Analisis Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon dengan Model Pembangunan As-Syatibi

Pengentasan kemiskinan berbasis maqashid syariah merupakan menyempurnakan konsep pembangunan yang selama ini diterapkan. Pembangunan yang selama ini telah dilakukan bukan berarti tidak tepat, perlu terus dilakukan pengkajian mendapatkan konsep yang lebih baik, sehingga mendekati sempurna.

Pengentasan kemiskinan pendekatan maqashid syariah ini tidak akan terlepas dari menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturuan dan Harta. Lebih lanjut terlihat dalam tabel berikut ini:

No	Maqashid Syariah	Tujuan Pembangunan Islam	Program Pengentasan Kemiskinan
1	Menjaga Agama	Menumbuhkan dan menjamin Tauhid dan spritualitas.	Menumbuhkan dan mengembangkan karakter moral.
2	Menjaga Jiwa	Menjamin Kebutuhan Dasar Manusia	Memenuhi kebutuhan minimum

No	Maqashid Syariah	Tujuan Pembangunan Islam	Program Pengentasan Kemiskinan
3	Menjaga Akal	Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia	Menumbuhkan karakter berprestasi dan kompetensi
4	Menjaga Keturunan	Menjamin keberlangsungan hidup manusia jangka panjang	Menumbuhkan dan mengembangkan tanggung jawab membangun keluarga.
5	Menjaga Harta	Menjamin harta berputar kesemua kalangan.	Regulasi berpihak kepada kelompok yang wajib dibantu

Menumbuhkan dan mengembangkan karakter moral dimulai dari pemahaman yang baik dan benar terhadap agama, agama adalah indikator kebenaran mutlak, karenanya rasa bangga dan bersyukur dengan adanya agama adalah hal mutlak, setiap individu mengetahui persis kehidupannya dari mana, sedang dimana dan akan kemana. Dengan mengetahui posisi diri ini, akan membaut rakyat menyadari akhirnya kehidupan dipertanggung jawabkan, karenanya mutlak mengikuti aturan Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator agar tauhid dan spritualitas rakyat terjaga. Islam bukan hanya syiar, juga substansinya adalah setiap individu takut kepada Allah SWT. Program-program pemerintah dan menjaga tauhid dan spritualitas ini bagian dasar dari mengangkat rakyat dari kemiskinan.

Memenuhi kebutuhan minimum rakyat, dengan prioritas utama pada tiga bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, dan pelatihan sesuai keinginan rakyat, jadi setiap diri mempunyai kesempatan untuk berpendidikan atau pelatihan gratis, dibiayai oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sudah mempunyai konsep asuransi kesehatan, ini bisa terus dikembangkan semakin baik, hingga rakyat tidak perlu membayar mahal untuk kesehatannya. Salah satu indikatornya adalah tidak tumbuhnya rumah sakit baru yang mahal, karena rakyat terpenuhi kebutuhan kesehatannya lewat rumah sakit pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah. Ekonomi rakyat wajib dibantu, terutama sektor petani, nelayan dan UMKM, yang puluhan juta orang bergantung pada sektor ini, dan mereka bangga menjadi petani, nelayan dan

UMKM, karena mereka mitra dekat pemerintah.

Menumbuhkan karakter kinerja, berprestasi dan kompetensi, bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak semua orang mempunyai kemampuan kognitif, sehingga dia mampu sekolah, kuliah berprestasi. Sebagian masyarakat mempunyai kecerdasan di bidang-bidang yang lain, seperti interpersonal, intrapersonal, spasial, kinestetik, seni dan berbagai bidang. Pemerintah mampu mengakomodir semua kecerdasan, sehingga rakyat mereka bisa berkarya dan berkontribusi untuk pembangunan dari berbagai sektor, dan pada akhirnya semua bidang tersebut bisa mengantarkan pada kebahagiaan.

Menumbuhkan dan mengembangkan tanggung jawab membangun keluarga, programnya adalah menjaga kesehatan dan naluri manusiawi pemuda beranjak dewasa untuk mempunyai pasangan dan membangun keluarga. mempunyai rasa tanggung jawab membangun keluarga sehat, melahirkan generasi sehat dan tangguh dimasa mendatang. Pemerintah mempunyai program mendorong pemuda dan pemudi untuk segera menikah dan memfasilitasi proses pernikahan gratis untuk semua kalangan.

Regulasi keberpihakan pemerintah pada kelompok yang tepat dibantu. Dalam menjaga harta, ada kelompok konglomerat yang memang sangat cerdas dalam pengembangan harta. Kelompok konglomerat ini diberi keleluasan untuk mengembangkan harta mereka, secara maksimal dengan batasan tidak mengakibatkan kelompok masyarakat menengah dan miskin semakin turun ekonominya. Konglomerat ketika maksimal mengembangkan harta mereka, akan membuka lapangan pekerjaan, membuat roda ekonomi bergerak semakin kencang, aliran ekonomi akan mengalir kesemua elemen masyarakat. Pemerintah mengambil peran mitra yang adil dan jujur, untuk berpihak pada kelompok masyarakat menengah dan bawah, agar kelompok ini juga bisa naik kelas terus menerus. Berbagai program diarahkan kepada kelompok ini, dan terus menghadirkan keadilan dalam ekonomi, instrument yang tepat adalah mengadopsi ekonomi Islam secara utuh, sehingga bukan hanya ekonomi yang maju, berkah Allah turun mulai dari pimpinan daerah sampai rakyat.

Analisis Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dengan Model Pembangunan Ibnu Khaldun

a. G : Negara (*The State*)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Kapita



Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk Miskin
2015	Rp77.057.930,37	16.960
2016	Rp81.953.574,00	14.900
2017	Rp88.871.488,80	14.890
2018	Rp96.909.883,39	13.964
2019	Rp103.991.893,60	13.200
2020	Rp103.182.062,67	16.310

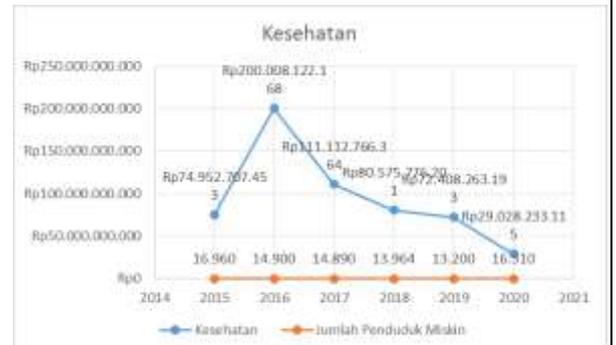
Sumber: cilegonkota.bps.go.id

Tabel dan grafik diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan yang cukup baik dari setiap tahunnya yang membuat jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan pada periode tersebut walaupun jumlahnya tidak stabil. Pada tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan yang cukup banyak yang membuat jumlah penduduk miskinnya juga semakin meningkat hingga hampir menyentuh jumlah kemiskinan kembali pada tahun 2015. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika PDRB meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.

Dalam teori pembangunan Ibnu Khaldun negara mempunyai tugas pokok dalam bidang ekonomi yaitu menghilangkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat yang tinggal di negara tersebut. Pada kasus kota Cilegon masih nampak jumlah penduduk miskin terlihat dari data di atas masih banyak walaupun dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Tahun 2020 lonjakan penduduk miskin terjadi dan PDRB kota Cilegon pada setiap tahunnya masih dikatakan belum cukup besar untuk menekan jumlah kemiskinan yang ada. Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia harus toleran, moderat, dan adil, serta harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan kepalsuan. Ia juga dituntut harus memenuhi semua kewajibannya, kontrak-kontrak, dan

perjanjian-perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka terutama terhadap golongan miskin, serta menghapuskan ketidakadilan dan penindasan.

b. S : Institusi/Syariah (Institutions/Sharia) Pengeluaran Pemerintahan Untuk Pendidikan dan Kesehatan



Tahun	Kesehatan	Jumlah Penduduk Miskin
2015	Rp74.952.707,453	16.960
2016	Rp200.008.122,168	14.900
2017	Rp111.112.766,364	14.890
2018	Rp80.575.776,201	13.964
2019	Rp72.408.263,193	13.200
2020	Rp29.028.233,115	16.310

Sumber: dinkes.cilegon.go.id dan cilegonkota.bps.go.id

Tabel dan grafik diatas menunjukkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota Cilegon untuk kesehatan pada tahun 2015-2020 berbeda-beda yang membuat tingkat kemiskinan di kota Cilegon mengalami perubahan. Dari data di atas anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak stabil pada setiap tahunnya. Lonjakan tingkat kemiskinan yang semakin naik secara cepat yaitu pada tahun 2020 karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Cilegon paling sedikit dari tahun sebelumnya. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara kesehatan dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika kesehatan meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.



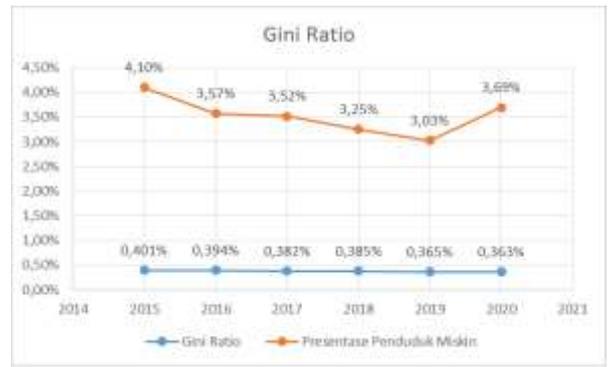
Tahun	Pendidikan	Jumlah Penduduk Miskin
2015	Rp110.500.000.000	16.960
2016	Rp5.600.000.000	14.900
2017	Rp198.600.000.000	14.890
2018	Rp256.620.000.000	13.964
2019	Rp275.600.000.000	13.200
2020	Rp317.900.000.000	16.310

Sumber: npd.kemdikbud.go.id dan cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel dan grafik di atas anggaran pemerintah kota Cilegon untuk pendidikan setiap tahunnya berbeda-beda anggaran terkecil dari data di atas yaitu pada tahun 2016, namun pada tahun 2015 anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota Cilegon hingga ratusan triliun namun pada tahun 2015 hanya Rp 5.600.000.000. Pada tahun 2017-2020 anggaran kembali bertambah hingga ratusan triliun pada setiap tahunnya yang mana dari tahun ke tahun semakin banyak anggaran yang diberikan pemerintah kota Cilegon, namun pada tahun 2020 anggaran yang menyentuh angka Rp 317.900.000.000 malah membuat jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika pendidikan meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.

Dari kedua data di atas yaitu anggaran Kesehatan dan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah kota Cilegon dalam menekan jumlah penduduk miskin masih bisa dikatakan belum maksimal, karena masih belum bisa menekan laju kemiskinan yang ada. Dalam model pembangunan Ibnu Khaldun, Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya, dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Dari gagasan yang dibuat model pembangunan Ibnu Khaldun yang membantu masyarakat dalam menanamkan kualitas kebaikan dan Syariah ini menjadi sebuah keseimbangan sumber daya yang bisa membantu kota Cilegon dalam mengentas kemiskinan.

c. **N : Sumber Daya Insani (Human Beings)**
Gini Ratio



Tahun	Gini Ratio	Presentase Penduduk Miskin
2015	0,401%	4,10%
2016	0,394%	3,57%
2017	0,382%	3,52%
2018	0,385%	3,25%
2019	0,365%	3,03%
2020	0,363%	3,69%

Sumber: cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel dan grafik di atas Persentase gini ratio kota Cilegon pada tahun 2015-2020 mempunyai nilai persentase yang semakin menurun mendekati angka 0. Nilai gini ratio semakin mendekati 0 bermakna pembangunan semakin merata, dan sebaliknya. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan, menunjukkan bahwa semakin merata pembangunan semakin sedikit penduduk miskin.

Model Pembangunan Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan pada peran manusia. Kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses sebab akibat dalam waktu yang panjang. Pembangunan sumber daya insani pada kota Cilegon haruslah mendapatkan perhatian, karena pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran sosial pada kota Cilegon juga harus memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

d. **W : Kekayaan (Wealth)**
Total Investasi



Tahun	Investasi	Jumlah Penduduk Miskin
2015	Rp14.040.000.000.000	16.960
2016	Rp25.536.000.000.000	14.900
2017	Rp9.465.000.000.000	14.890
2018	Rp8.244.000.000.000	13.964
2019	Rp8.414.135.529.500	13.200
2020	Rp18.143.836.300.000	16.310

Sumber: dpmptsp.cilegon.go.id dan cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel dan grafik di atas kota Cilegon mempunyai investasi yang sangat besar nominalnya pada setiap tahunnya. Nominal tertinggi yang dikeluarkan untuk investasi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 25.536.000.000.000, pada saat itu jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 investasi yang dikeluarkan kota Cilegon yaitu Rp 18.143.836.300.000 ini bukanlah jumlah yang sedikit tetapi jumlah penduduk miskin makin bertambah bukannya makin berkurang. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara investasi dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika investasi meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi karena kekayaan itu tidak tumbuh jika ditimbun dan disimpan. Namun akan tumbuh dan berkembang jika dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, lalu diberikan kepada yang berhak, dan menghapus kesulitan. Kota Cilegon seharusnya bisa menerapkan model Ibnu Khaldun dalam menekan laju kemiskinan yang ada sekarang.

e. **j: Keadilan (Justice) dan g: Pembangunan (Development)**

Indeks Persepsi Korupsi



Tahun	Indeks Persepsi Korupsi (CPI)	Presentase Penduduk Miskin
2015	36%	4,10%
2016	37%	3,57%
2017	37%	3,52%
2018	38%	3,25%
2019	40%	3,03%
2020	37%	3,69%

Sumber: lokadata.beritagar.id dan cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel dan grafik di atas persentase Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada setiap tahunnya berbeda-beda. Indeks Persepsi Korupsi tertinggi jatuh pada tahun 2019 yaitu 40% dan persentase tingkat penduduk miskin kota Cilegon sebesar 3,03%. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara Indeks Persepsi Korupsi dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika Indeks Persepsi Korupsi meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun	IPM	Presentase Penduduk Miskin
2015	71,81%	4,10%
2016	72,04%	3,57%
2017	72,29%	3,52%
2018	72,65%	3,25%
2019	73,01%	3,03%
2020	73,05%	3,69%

Sumber: cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel dan grafik di atas persentase Indeks Pembangunan Manusia kota Cilegon pada tahun 2015 = 71,81%, 2016 = 72,04%, 2017 = 72,29%, 2018 = 72,65%, 2019 = 73,01%, dan 2020 = 73,05% yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya walaupun sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia kota cilegon setahap demi setahap semakin baik dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskinnya pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan, namun pada 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan kembali. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk miskin, yaitu jika IPM meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun dan sebaliknya.

Dalam model pembangunan Ibnu Khaldun pembangunan dan keadilan sangatlah penting dalam mata rantai sebab akibat. pembangunan mencakup semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan

hakiki manusia. Maka dari itu pembangunan kota Cilegon tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tanpa ada unsur keadilan (Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia). Dan ini adalah salah satu kesempatan bagi kota Cilegon dalam menekan laju kemiskinan yang ada.

Dari analisis data empirik diatas didapatkan fakta bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui (1). Meningkatkan PDRB. (2). Meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. (3). Pemerataan pembangunan. (4). Meningkatkan investasi. (5). Meningkatkan Pengeluaran untuk pembangunan SDM.

Jika dikaitkan dengan model pembangunan Ibn Khaldun:

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

G : Negara (*The State*)

S : Institusi/Syariah (*Institutions/Sharia*)

N : Sumber daya insani (*Human Beings*)

W : Kekayaan (*Wealth*)

j : Keadilan (*Justice*)

g : Pembangunan (*Development*)

Maka pengentasan kemiskinan yang dilakukan di kota Cilegon, bisa disempurnakan dengan menjadikan pengeluaran pemerintah kota cilegon pada bidang syariah (pendidikan, kesehatan, dan membangun tauhid rakyat), dan memastikan keadilan hadir di tengah tengah masyarakat. Keadilan dibidang hukum, ekonomi dan politik.

Konsep tersebut ada dalam ekonomi islam, yaitu menghadirkan *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat), Landasannya Al-Qur'an surat Al Baqarah (2): 208: "*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu*". Bentuk operasionalisasinya adalah mengambil konsep ekonomi islam secara utuh, instrumennya melalui memahami dan mengamalkan tauhid, pelarangan riba, menumbuh suburkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, menghadirkan keadilan.

Masyarakat akan menjadi subjek dan objek pembangunan, sumber pembiayaan pembangunan secara bertahap digali dari sumber yang halal dan berkah, akhirnya rahmat dan berkah Allah hadir, penduduk miskin akan berkurang, baik karena miskin ekonomi, maupun miskin tauhid. Kota Cilegon menjadi kota yang dipenuhi dengan sinar berkah. Aamiin ya robbil alamin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan:

- Model Pembangunan as-Syatibi berbasis Maqashid Syariah merupakan penyempurnaan program yang telah dijalankan, bentuk program pengentasan kemiskinan bisa berrupa: (1). Menumbuhkan dan mengembangkan karakter moral. (2). Memenuhi kebutuhan minimum. (3). Menumbuhkan karakter berprestasi dan kompetensi. (4). Menumbuhkan dan mengembangkan tanggung jawab membangun keluarga. (5). Regulasi berpihak kepada kelompok yang wajib dibantu.
- Dari analisis data empirik diatas didapatkan fakta bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui (1). Meningkatkan PDRB. (2). Meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. (3). Pemerataan pembangunan. (4). Meningkatkan investasi. (5). Meningkatkan Pengeluaran untuk pembangunan SDM
- Model Pembangunan Ibnu Khaldun menjadi penyempurnaan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh kota cilegon dengan cara menghidupkan tauhid, mengambil secara utuh ekonomi islam, menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.

5.2. Saran

Kemiskinan akan terus terjadi, diperlukan tindakan cepat dari pemerintah. Upaya pemerintah yang ada terus perlu disempurnakan, menggunakan konsep-konsep Ekonomi Islam. Konsep Ekonomi konvensional sudah terus diuji bertahun tahun, hasilnya juga bisa dievaluasi. Dengan konsep ekonomi islam, akan menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan, akan muncul berbagai sumber pembiayaan pembangunan baru untuk pengentasan kemiskinan secara massif, melalui peran aktif rakyat melalui konsep ekonomi islam. salah satunya dengan zakat. Kewajiban zakat segera dibayarkan, karena ada hak orang lain yang berada di harta halal, ada hukuman dari Allah bagi yang tidak mau membayar zakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haughton, Jonathon dan Shahidur R. Khandker, 2012, Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality), Jakarta: Salemba Empat

- Isdjoyo, W. (2010). Kemiskinan di Perkotaan: Masukan untuk Rencana Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional. Paparan pada Expert Meeting Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional. Jakarta.
- Mahri, A. Jajang W, Cupian, dik. 2021. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mukhtar. (2013). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabetha.

Jurnal

- Nor, Radieah Moh. 2013. Perbandingan Tentang Konsep Kemiskinan Pendekatan Konvensional Dan Islam. *Jurnal Kemanusiaan*.
- Affandi, Akhmad dan Dewi Puji Astuti. 2013. Dynamic Model Of Ibn Khaldun Theory On Poverty (Empirical Analysis On The Poverty In Majority And Minority Muslim Population After The Financial Crisis). *Humanomics*. Vol. 29 Iss 2 pp. 136-160.

Internet

- Banpo.co. 2021. Realisasi Program KCS, 520 Mahasiswa Dapat Beasiswa Full Sarjana Diperoleh pada tanggal 28 November 2021 dari URL <https://banpos.co/2021/08/31/realisasi-program-kcs-520-mahasiswa-dapat-beasiswa-full-sarjana/>
- Bps.go.id. Kemiskinan dan Ketimpangan. Diperoleh pada tanggal 04 November 2021 dari URL <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Cilegon Antaranews Banten. 2018. Sejarah Kota Cilegon. Diperoleh pada tanggal 18 November 2021 dari URL <https://banten.antaranews.com/berita/31341/gubernur-banten-salurkan-jamsosratu-bagi-warga-cilegon>
- Cilegon.go.id. Sejarah Kota Cilegon. Diperoleh pada tanggal 18 November 2021 dari URL <http://www.cilegon.go.id/home/>
- Cilegonkota.bps.go. Kemiskinan. Diperoleh pada tanggal 04 November 2021 dari URL <https://cilegonkota.bps.go.id>

- Dinkes.cilegon.go.id. Informasi Publik. Diperoleh pada tanggal 12 Desember 2021 dari URL <http://dinkes.cilegon.go.id/page/detail/informasi-publik>
- Dpmptsp.cilegon.go.id. Realisasi Investasi Kota Cilegon. Diperoleh pada tanggal 12 Desember 2021 dari URL <http://dpmptsp.cilegon.go.id:84/realisasi-investasi-kota-cilegon/>
- Gis.dukcapil.kemendagri.go.id. 2021. Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil. Diperoleh pada tanggal 04 November 2021 dari URL <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Kemendikbud.go.id. Neraca Pendidikan Daerah. Diperoleh pada tanggal 12 Desember 2021 dari URL <https://npd.kemdikbud.go.id>
- kompasiana.com. 2021. Mimpi Manis "Kartu Cilegon Sejahtera" di Hadapan Angka Kemiskinan yang Meroket. Diperoleh pada tanggal 28 November 2021 dari URL <https://www.kompasiana.com/mangpram/6032a79a8ede48402e614322/mimpi-manis-kartu-cilegon-sejahtera-di-hadapan-angka-kemiskinan-yang-meroket>
- Lokadata.beritagar.id. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020. Diperoleh pada tanggal 12 Desember 2021 dari URL <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/index-s-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280#>
- Saputra, Yulian. 2020. 3 Bulan, Warga Miskin di Cilegon Bertambah 5.460 KK Akibat Covid-19. Diperoleh pada tanggal 04 November 2021 dari URL <https://poskota.co.id/2021/2/19/3-bulan-warga-miskin-di-cilegon-bertambah-5460-kk-akibat-covid-19?view=all>
- Sigit Angki Nugraha, 2021. Tak Ada Petugas, Pendataan Kartu Cilegon Sejahtera atau KCS di Wilayah Kota Cilegon Ini tak Jelas?. Diperoleh pada tanggal 28 November 2021 dari URL <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592613161/tak-ada-petugas-pendataan-kartu-cilegon-sejahtera-atau-kcs-di-wilayah-kota-cilegon-ini-tak-jelas>